

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada organisasi sektor publik, masih banyak terdapat fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan informasi yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan dalam laporan keuangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) semakin meningkat. Hal tersebut juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai dan informasi tersebut harus mempunyai nilai. Menurut Suwardjono (2005) nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat jika informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai serta informasi juga bermanfaat jika pemakai mempercayai informasi tersebut. Sehingga nilai informasi merupakan kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut benar atau valid, serta ketersediaan informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dijelaskan bahwa :

Standar akuntansi pemerintahan diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat lima opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Salah satu hal yang mungkin mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan suatu entitas sektor publik adalah pemanfaatan sistem informasi yang dilakukan oleh suatu entitas tersebut. Tersedianya sistem informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari berbagai tulisan dapat diketahui bahwa, ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-

penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) meningkat.

Seperti fenomena dalam penelitian ini yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu Kota di provinsi Banten yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan provinsi Banten terhadap Laporan Keuangan pemerintah Kota Tangsel meraih opini WTP pada tahun 2010, 2011, 2012 dan tahun 2015. Untuk tahun 2013 dan tahun 2014, kota termuda di Provinsi Banten ini hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan pemerintah. Pencapaian meraih opini WTP kembali tidak terlepas dari usaha segenap pihak Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan yang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan nilai informasi atas laporan keuangan yang dihasilkan, yang ditempuh melalui beberapa cara, antara lain pemanfaatan sistem informasi ke dalam proses pengelolaan keuangan daerah, serta pengawasan yang lebih intensif dari aparat pengawas fungsional daerah. Pemanfaatan serta integrasi sistem informasi akuntansi keuangan daerah mulai diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2015. Melalui pemanfaatan dan integrasi sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang lebih efektif dan memadai serta peningkatan sarana dan prasarana, diharapkan dapat menunjang dan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel serta menciptakan *good governance government*.

Berdasarkan hasil prariset yang dilakukan pada Ibu Eva Suryani, S. SiT, MT selaku Kasi Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kantor Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa:

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berperan penting terutama untuk transparansi, akurasi, dan akuntabilitas laporan keuangan lebih bisa terbaca melalui sistem. Contohnya seperti pemanfaatan simral (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan). Dalam simral anggaran yang sudah didapat tidak dapat diubah-ubah karena sudah terkunci oleh sistem. Salah satu penyebab laporan keuangan pemerintah daerah kota tangsel mendapat opini WDP pada tahun 2013 dan 2014 yaitu karena adanya kesalahan dalam pengelolaan keuangan, mungkin ada kendala di SPJ nya.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, sehingga pada tahun 2015 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Aplikasi SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan) mencakup semua proses dalam perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan dan kegiatan pembangunan di pemerintah daerah. Diantaranya meliputi proses pencatatan dan pengolahan data hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), RKPD, Renja SKPD, PPAS, penyusunan RKA/RAPBD, DPA, Anggaran Kas, penerbitan SPD, penatausahaan pendapatan dan belanja, penatausahaan kas daerah, akuntansi berbasis akrual, dan pelaporan-pelaporan yang dibutuhkan untuk mendukung sistem akuntansi berbasis akrual. Untuk Penatausahaan Belanja meliputi Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D serta BKU untuk pencatatan transaksi belanja dan pendapatan.

Alasan peneliti memilih situs penelitian di Tangerang Selatan karena; berdasarkan berita yang didapat dari www.bidiktangsel.com yaitu fenomena yang terjadi dan data penggunaan SIMRAL berada di kota Tangerang Selatan. Selain itu sebelum tahun 2013, di Tangerang Selatan belum menggunakan Sistem Informasi Akuntansi sehingga terjadinya fraud sulit dideteksi dan hal ini berdampak pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, diantaranya; Hertanto, dkk (2016) melakukan penelitian dengan judul Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Efektivitas Pelaporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Blitar). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa SIMDA

dalam Aplikasi Keuangan dalam proses pengelolaan keuangan, khususnya pelaporan keuangan kerja yang lebih baik namun tetap tidak dapat dikatakan efektif sepenuhnya, hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala yang pada dasarnya masih sangat berpengaruh pada Implementasi SIMDA Aplikasi Keuangan. Pangestika & Sari (2016) melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal. Hasil analisis efektivitas sistem informasi manajemen daerah pada dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab.Tegal diperoleh bahwa Laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA dapat dipahami oleh masyarakat, para wakil rakyat, investor dan pemerintah, dan laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA relevan, Andal dan dapat diperbandingkan, pada tahun 2008 sebelum diterapkannya SIMDA Peraturan Bupati untuk tahun anggaran 2008 dapat diterbitkan pada 23 Januari tahun 2008 setelah adanya SIMDA pada tahun 2014 Peraturan Bupati untuk tahun anggaran 2015 dapat diterbitkan pada 31 Desember 2014. Dan sistem informasi yang dihasilkan Sistem Informasi Manajemen Daerah Berdasarkan hasil dengan pendekatan fenomenologi adalah efektif. Rahantoknam, dkk (2017) melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum staf BKAD Kabupaten Maluku Tenggara telah memahami makna SIMDA keuangan. Faktor-faktor pendukung penerapan implementasi keuangan SIMDA yaitu komunikasi, sikap/disposisi dan struktur birokrasi. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh SIMDA keuangan dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan.

Berdasarkan fenomena, terdapat perbedaan dari hasil penelitian terdahulu (*gap research*) dan belum adanya penelitian yang dilakukan di Kantor Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN (SIMRAL) DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN.”**

I.2 Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada penerapan sistem informasi akuntansi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah kota Tangerang Selatan yang meliputi tujuan, faktor pendukung dan penghambat. Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di area atau lapangan penelitian. Dengan kata lain, walaupun rumusan masalah sudah cukup baik dan telah dirumuskan atas dasar penelaahan kepustakaan dan dengan ditunjang oleh sejumlah pengalaman tertentu, bisa terjadi situasi di lapangan tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti masalah itu. Dengan demikian kepastian tentang fokus dan masalah itu yang menentukan adalah keadaan di lapangan (Moleong, 2010 hlm. 94). Untuk itu fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Penerapan SIMRAL pada Pemerintah Daerah Kota Tangerang dimana proses perencanaan, penganggaran, pelaporan dan penatausahaan sudah terintegrasi.
- b. Aplikasi SIMRAL yang terhubung ke internet dimana kestabilan jaringannya didukung BPPT dan bagian Kominfo.
- c. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kota Tangerang Selatan menjadi lebih mudah, cepat dan mengefisiensi biaya sejak diterapkannya SIMRAL.

I.3 Perumusan Masalah

Bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah kota Tangerang Selatan?

I.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah kota Tangerang Selatan.

I.5 Manfaat Hasil Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan SIMRAL, dapat dijadikan sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan memperoleh pemahaman mengenai faktor-faktor pendukung serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMRAL.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah agar dapat menerapkan SIMRAL lebih efektif dan efisien.

2) Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada bagian BPKAD sehingga penganggaran dan penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan menggunakan aplikasi SIMRAL lebih berkualitas.

3) Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada OPD sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan SIMRAL berjalan dengan baik.